

**KIAI DAN POLITIK: PERAN DAN IMPLIKASI SOSIAL DALAM
PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
DI SUMATERA SELATAN**

Oleh: Zainuddin¹

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya
e-mail: z.nudien1@gmail.com

Abstract

This research focuses on the pattern of Kiai and political relations to the authority and legitimacy of the Kiai in educational institutions, and the community. In the opinion of the author, there is a tendency that the authority and legitimacy of the Kiai are increasingly fading away, especially the Kiai who are in contact with politics. So the writer at this level will use the conceptualization of Peter L. Berger with a social construction approach. With this approach, the author wants to see how the conceptualization of Kiai as a social reality forms new meanings of people's understanding of the world of Kiai in the context of local politics. According to the author, this discussion is important to see how the authority and legitimacy of the Kiai in pesantren, including the community, which in the process will also influence the existence of the Kiai. Both the existence of Kiai as the head of the pesantren, as religious leaders, included the existence of educational institutions developed by Kiai. For this reason, the type of qualitative descriptive research is the choice of the author to facilitate the description of the results of this study. The methods used are field observations, in-depth interviews and documentation. The results of the study showed that the Kiai did not have to come from the pesantren culture or the Kiai culture itself. However, Kiai is like a structural official whose role and function are only Mudir al-ma'had (director of the pesantren) who can be appointed and dismissed by the foundation. This phenomenon certainly opens space for anyone to become a Kiai, regardless of whether he has religious knowledge or depends on the decision of the foundation.

Keywords: Kiai, pesantren, politics, legitimacy, social construction

¹Dosen Aktif pada Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (STITQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

Abstrak

Penelitian ini menitikberatkan pada pola hubungan Kiai dan politik terhadap otoritas maupun legitimasi Kiai pada lembaga pendidikan, dan masyarakat. Menurut hemat penulis, ada kecenderungan bahwa otoritas dan legitimasi Kiai makin hari kian memudar, terlebih Kiai yang bersinggungan dengan politik. Maka penulis pada tataran ini akan menggunakan konseptualisasi Peter L. Berger dengan pendekatan konstruksi sosial. Dengan pendekatan ini, penulis ingin melihat bagaimana konseptualisasi Kiai sebagai realitas sosial membentuk makna-makna baru dari pemahaman masyarakat terhadap dunia Kiai dalam konteks politik lokal. Pembahasan ini menurut hemat penulis menjadi penting untuk melihat bagaimana otoritas dan legitimasi Kiai pada pesantren termasuk masyarakat yang pada prosesnya akan turut mempengaruhi eksistensi Kiai. Baik eksistensi Kiai sebagai pimpinan pesantren, sebagai tokoh agama termasuk eksistensi lembaga pendidikan yang dikembangkan Kiai. Untuk itu, jenis penelitian deskriptif kualitatif menjadi pilihan penulis untuk memudahkan dalam medeskripsikan hasil penelitian ini. Adapun metode yang digunakan adalah pengamatan lapangan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Kiai tidak harus berasal dari kultur pesantren maupun kultur Kiai itu sendiri. Akan tetapi Kiai tidak ubahnya sebatas pejabat struktural yang peran dan fungsinya hanya sebagai *Mudir al-ma'had* (direktur pesantren) yang dapat diangkat dan diberhentikan oleh yayasan. Fenomena ini tentu membuka ruang bagi siapapun untuk menjadi Kiai, terlepas ia memiliki kedalaman ilmu agama atau bergantung keputusan yayasan.

Kata kunci: Kiai, pesantren, politik, legitimasi, konstruksi sosial

A. Pendahuluan

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian selatan pulau Sumatera Indonesia dengan ibu kotanya Palembang. Provinsi dengan Jumlah penduduk yang mayoritas Islam ini, secara astronomis terletak pada 1°-4° Lintang Selatan dan 102°-106° Bujur Timur dengan luas daerah seluruhnya 87.017,41 km.,dengan memiliki dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau serta memiliki iklim tropis dan basah yang membuatnya sangat potensial untuk pertanian dan perkebunan yang menjadi andalan masyarakatnya.²

Sumatera Selatan berdasarkan catatan Streenbrink menjadikan keraton sebagai pusat ilmu agama dan juga sastra, berbeda dengan tradisi atau kebiasaan masyarakat Jawa yang justeru menjadikan Pesantren sebagai pusat pendidikan agama dan lainnya.³Dari pernyataan ini, menunjukkan bahwa ada kedekatan penguasa (keraton) dengan tokoh agama, tentunya hal ini menjadikan Islam memiliki tempat istimewa bagi masyarakat Sumatera Selatan khususnya Sultan. Sebagaimana yang dikatakan Husni Rahim, sultanlah yang memegang kekuasaan tertinggi dibidang keagamaan. Akan tetapi dikarenakan sultan bukan seorang yang ahli dalam bidang agama, maka atas inisiatifnya dibentuklah lembaga keagamaan yang disebut penghulu.⁴

Melihat fenomena di atas, maka dapat dipahami bahwa kepemimpinan pemimpin agama Islam menempati posisi yang sangat penting dalam struktur sosial masyarakat Sumatera Selatan.Selanjutnya, secara kultural munculnya elit (agama) atau umumnya disebut Kiaibersamaan dengan berdirinya pondok pesantren pertama di Sumatera Selatan, yakni pesantren Seri Bandung di Tanjung Batu Ogan Ilir. Dengan munculnya pesantren ini, merupakan embrio munculnya pesantren-pesantren lain seperti pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga, Pesantren al-Ittifaqiah Indralaya, serta pesantren-pesantren lain yang menurut catatan Kementerian Agama Sumatera Selatan setidaknya terdapat 321 pesantren⁵ yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Selatan.

Dengan demikian, keberadaan Kiaidalam konstruksi sosial masyarakat Sumatera Selatan tentunya memiliki karakteristik dan keunikan yang berbeda dengan masyarakat lainnya. Bagi peneliti fenomena ini menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Untuk mengkaji fenomena ini, muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut; bagaimana kedudukan

²Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, *Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka 2018*, hlm. 3-40

³Karel A. Steenbrink, *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke 19* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 186

⁴Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang* (Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, 1998), hlm. 14

⁵Data Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017

dan peran sosial politik Kiai serta legitimasi Kiai dalam pengembangan lembaga pendidikan di Sumatera Selatan? penelitian ini akan penulis telaah dengan pendekatan fenomenologi dengan teori konstruksi sosial Peter L. Berger. Metode yang digunakan adalah pengamatan langsung dan wawancara mendalam.

B. Pembahasan

1. *Konseptualisasi Kiai atas Realitas Sosial*

Kiai⁶ merupakan struktur paling penting dalam komunitas pesantren. Sebagaimana yang dikatakan Dhofier, pertumbuhan dan perkembangan pesantren sedikit banyak bergantung pada figur Kiai itu sendiri. Dilihat dari kaca mata sosio-kultural, Kiai merupakan elit (agama) dalam struktur sosial dan politik masyarakat Indonesia bahkan dari segi ekonomi. Realitas sosial masyarakat menyatakan bahwa Kiai menduduki posisi puncak (baca: kelas atas) dalam lapisan masyarakat⁷ bahkan banyak anggapan yang mengatakan bahwa pesantren yang dipimpin Kiai merupakan kerajaan kecil dimana Kiai memiliki kuasa mutlak dan kewenangan penuh dalam tata kelola dan kehidupan pesantren⁸.

Menurut catatan, tidak ada persyaratan secara akademis seseorang untuk menjadi Kiai. Akan tetapi seseorang dipanggil atau menjadi Kiai datang dari masyarakat, karena orang tersebut dianggap memiliki kedalaman ilmu agama Islam dan umumnya memimpin pesantren serta mengajarkan kitab klasik (baca: kuning).⁹ Kendati tidak ada prasarat jenjang akademik untuk menjadi Kiai, setidaknya seseorang dipanggil Kiai karena beberapa faktor berikut ini; *pertama*: Kiai, paling tidak memiliki kedalaman ilmu agama Islam serta pengetahuan yang luas melebihi masyarakat pada umumnya, *kedua*: Moralitas yang baik serta integritas Kiai ditampilkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari, *ketiga*: Legitimasi dan pengakuan akan kekiai-annya tumbuh dan datang dari masyarakat luas,

⁶Kiai memiliki kharisma dan legitimasi yang begitu kuat dalam akar tradisi masyarakat Indonesia, dikarenakan faktor lingkungan dan sistem sosial yang ada. Selain itu, Geertz menyatakan bahwa Kiai mempunyai posisi sangat strategis dan penting dalam sistem budaya masyarakat Indonesia yakni sebagai makelar budaya (*cultural broker*), dan sebagai makelar moral, bukan itu saja, Kiai menduduki kelompok masyarakat kelas atas dalam struktur sosial, sehingga seringkali Kiai mendapatkan pengkultusan oleh santrinya, hanya karena ingin mendapat berkah. Lihat lebih lanjut, Clifford Geertz, *The Javanese Kijai: The Changing Role of Cultural Broker*, dalam *Comparative Studies in Society and History*, vol. 2, hlm. 228-259. Lihat, Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 203. Lihat, Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah....*, hlm. 298

⁷Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 206.

⁸Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Menegenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 93-94

⁹Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi...* hlm. 93

bukan atas dasar pengakuan sendiri¹⁰ dan *keempat*: Kiai setidaknya memiliki pesantren atau minimal memimpin pesantren, meskipun dalam banyak kategori Kiai tidak harus memimpin pesantren.

Melihat fenomena tersebut di atas, konseptualisasi atau pemaknaan Kiai, berangkat dari konstruksi sosial masyarakat pada umumnya. Konstruksi sosial masyarakat semakin menguatkan eksistensi dan otoritas Kiai, tidak hanya pada lingkungan pesantren, tetapi juga pada masyarakat. Otoritas Kiai tidak hanya soal agama, sosial dan politik, akan tetapi juga terkait dengan persoalan-persoalan sehari-hari masyarakat seperti soal warisan, perkawinan dan perceraian serta persoalan lainnya.¹¹ Dengan demikian, sosok Kiai merupakan sosok yang sangat dekat dengan kehidupan sosial masyarakat sehari-hari, dan menjadi rujukan dalam berbagai persoalan masyarakat.

2. *Implikasi dan Peran Sosial Politik Kiai di Sumatera Selatan*

Untuk melihat implikasi dari peran sosial politik Kiai yang terbentuk dari pola hubungan Kiai dan politik terhadap otoritas dan legitimasi Kiai pada lembaga pendidikan, dan masyarakat. Maka ada baiknya penulis membahas terlebih dahulu bagaimana hubungan antar Kiai, masyarakat dan pesantren sebagai realitas sosial. Maka penulis pada tataran ini akan menggunakan konseptualisasi Berger dengan pendekatan konstruksi sosial yang di dalamnya menjelaskan adanya proses dialektika antara diri (individu) dengan dunia sosio-kultural (masyarakat) yang berlangsung dalam suatu proses tertentu yang di dalamnya memuat tiga faktor penting, yaitu: *eksternalisasi*, *objektivasi*, dan *internalisasi*.¹² Dengan pendekatan ini, kita akan melihat bagaimana konseptualisasi Kiai sebagai realitas sosial membentuk makna-makna baru dari pemahaman masyarakat terhadap dunia Kiai dalam konteks politik lokal pasca runtuhnya Orde Baru. Pembahasan ini menurut hemat penulis menjadi penting untuk melihat otoritas dan legitimasi Kiai pada pesantren termasuk masyarakat yang pada prosesnya akan turut mempengaruhi eksistensi Kiai. Baik eksistensi Kiai sebagai pimpinan pesantren, sebagai tokoh agama

¹⁰Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Lantabora Press, 2005), hlm. 297-298.

¹¹Muhammad Tholhah Hasan, *Islam...* hlm. 298

¹²Irwan Abdullah, *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2010), hlm. 243

termasuk eksistensi lembaga pendidikan yang dikembangkan Kiai. Selanjutnya proses dialektika yang terjadi akan dijelaskan berikut ini:

a. Eksternalisasi

Esternalisasi merupakan titik awal proses adaptasi manusia dengan lingkungan, yakni dunia sosio-kultural. Proses adaptasi dengan lingkungan ini merupakan kemampuan alamiah manusia dalam membangun tatanan kehidupan. Sebagai konstruksi sosio-kultural, Kiai terbentuk melalui interaksi pengalaman manusia melalui proses adaptasi dan pengetahuan yang dimiliki. Proses ini seringkali menimbulkan penafsiran-penafsiran yang berbeda yang multi interpretasi. Dilihat dari kacamata sejarah, Kiai dianggap sebagai sosok yang suci dengan berbagai kharisma yang melekat padanya. Selanjutnya kharisma ini terbentuk melalui dua faktor utama, *pertama*, melalui garis genealogi sosial; *kedua*, melalui genealogi intelektual. Melalui dua faktor inilah Kiai menjadi figur yang sangat dihormati dan diikuti terutama oleh santri dan masyarakat dimana Kiai berada. Pemaknaan awal ini, tentunya dikemudian hari akan menimbulkan anggapan yang berbeda terhadap Kiai berdasarkan realitas sosial yang ada.

Pada perkembangan lebih lanjut, proses eskternalisasi dalam kerangka konstruksi sosial masyarakat terhadap momen Kiai yang bersinggungan dengan politik dapat dijabarkan dalam tiga hal berikut ini: *pertama*: konstruksi yang dibangun merujuk pada pemahaman Agama dengan merujuk teks-teks suci dari al-Qur'an dan al-Hadits, serta mengikuti ulama-ulama terdahulu. Dalam kerangka ini Kiai berpedoman pada pemahaman kitab klasik yang diajarkan ulama terdahulu dijadikan instrumen dalam pandangannya terhadap politik didalam membangun bangsa dan negara.¹³ Pada perspektif ini, ide pokoknya adalah bagaimana nilai-nilai agama dijadikan dasar ketika Kiai harus bersinggungan dengan politik. Sementara itu konstruksi sosial yang terbangun selama ini, menganggap politik identik dengan sesuatu yang kotor dan harus dijauhi. Untuk itu, tatkala Kiai harus berpolitik maka nilai-nilai dasar agama tetap menjadi instrumen yang melekat padanya dalam kerangka memberikan manfaat bagi umat.

Kedua, penyesuaian dengan interpretasi dan sosial kemasyarakatan yang merupakan dorongan sosial masyarakat dalam membangun nasionalisme sebagai bentuk pengabdian terhadap bangsa dan negara. *Ketiga*, adaptasi dengan tradisi dan

¹³Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama* (Yogyakarta: Lkis, 2007), hlm. 262

peristiwa masa lampau. Dalam sejarah politik bangsa Indonesia, Kiai identik dengan gerakan sosio-politik pada masa itu, apalagi dilihat dari konteks tradisi yang telah berjalan, mulai dari masa kolonial hingga masa reformasi. Masing-masing periode ini tentunya memiliki konseptualisasi yang dapat dijadikan rujukan, dan sebagian menyatu menjadi kerangka pikir masyarakat. Pemahaman selama ini, pesantren sebagai institusi seringkali dipahami sebagai realitas sosial yang terpisah dengan dunia politik. Pesantren dipahami sebagai institusi yang hanya fokus dalam pengajaran dan penanaman nilai-nilai agama semata. Realitas sosial ini, tentunya harus dipahami oleh Kiai ketika harus bersinggungan dengan politik praktis. Hal ini diperlukan karena tidak semua masyarakat mau memahami ketika Kiai berpolitik yang pada gilirannya dapat memengaruhi eksistensi Kiai sebagai pemimpin pesantren dan umat.

Ketiga, penyesuaian dengan interpretasi pemikiran masyarakat. Kiai sebagai struktur sosial masyarakat dipandang sebagai elit yang memiliki pengaruh dan otoritas yang kuat diberbagai sisi kehidupan masyarakat. Otoritas ini tidak hanya pada lingkungan pesantren yang dikembangkannya, akan tetapi terhadap masyarakat pada umumnya terutama masyarakat yang ada hubungan geneologi secara khusus dengan Kiai. Hubungan geneologi ini dapat dilihat dari garis keturunan (*nasab*) dan garis intelektual Kiai. Melihat dari kedua faktor ini, geneologi yang berjalan di Sumatera Selatan memiliki karakteristik yang berbeda dengan yang terjadi di Pulau Jawa. Rata-rata Kiai pesantren di Pulau Jawa memiliki garis keturunan Kiai, pun demikian dengan garis keilmuan, Kiai pesantren memiliki garis keilmuan atau rantai intelektual yang tidak terputus dalam lintasan zaman yang berbeda.¹⁴

Sementara itu, karakteristik geneologi yang terjadi di Sumatera Selatan berdasarkan hasil observasi penulis terlihat bahwa Kiai tidak serta merta berangkat dari garis keturunan Kiai termasuk garis intelektual yang tidak harus berangkat dari latar pendidikan pesantren¹⁵. Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Heru menyatakan “dengan adanya kebijakan dari pemerintah dalam hal ini kementerian agama, bahwa pondok pesantren harus terdaftar secara sah dan legal pada kementerian agama dan berada di bawah naungan yayasan Pendidikan Islam.”¹⁶ Berangkat dari pernyataan ini, maka menurut hemat penulis pemimpin pesantren (Kiai) hanya sebatas *Mudir al-ma’had* (direktur pesantren), yang diangkat dan diberhentikan oleh struktur

¹⁴Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren...* hlm. 108-122

¹⁵Observasi dan pengamatan lapangan pada tanggal 21 Mei 2018

¹⁶Wawancara dengan Khairuddin, S.Ag pada tanggal 28 Mei 2018

yayasan melalui forum musyawarah mufakat. Fenomena ini justru membuka peluang bahwa Kiai tidak harus berangkat dari kultur pesantren, akan tetapi siapapun bisa menjadi Kiai asalkan struktur yayasan menghendakinya. Peluang-peluang ini, pada perkembangannya akan mengancam eksistensi pesantren sebagai pusat kajian ilmu-ilmu agama Islam yang syarat dengan kajian kitab-kitab klasik dimana Kiai sebagai pusatnya.

Berangkat dari fenomenologi yang penulis gambarkan di atas, konstruksi sosial Kiai yang terbentuk pada gilirannya akan menguragi atau justru menghilangkan kharisma. Kiai yang dihormati dan diikuti karena pemahaman agamanya yang mendalam tentang ajaran agama Islam, lambat laun akan kehilangan eksistensinya. Selanjutnya, fungsi dan tugas Kiai hanya sebagai pejabat formal dalam struktur pesantren.¹⁷ Jika ini terjadi, maka keberadaan Kiai tidak lagi menjadi sumber rujukan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dampaknya, ketika Kiai bersentuhan dengan dunia politik (kontestasi pilkada dan sejenisnya) tidak lagi menjadi jaminan dalam perolehan suara. Seperti halnya yang terjadi pada tiga Kiai yang menjadi objek penelitian ini. Sebagai contoh; Kiai Buya Husni Thamrin, pada saat mencalonkan sebagai Bupati Banyuasin, berdasarkan hasil perolehan suara versi hitung cepat hanya mampu meraup suara 18.81 %, jauh di atas rivalnya sebanyak 32.94 %¹⁸ hal ini menandakan bahwa dengan jumlah santri dan alumni yang jumlahnya ribuan¹⁹ tidak menjadi penentu perolehan suara yang signifikan. Tentunya hal ini dapat juga dilihat dari berbagai faktor yang lain.

b. Objektivasi

Objektivasi menjadikan realitas sosial seakan-akan berada pada dua realitas sosial yang terpisah, yakni realitas diri yang subjektif dengan fenomena yang berada di luar diri manusia sebagai sesuatu yang objektif.²⁰ Realitas ini pada perkembangannya terbentuk melalui proses dimana dunia intersubjektif mengalami proses institusionalisasi atau pelebagaan. Melalui proses interaksi diri dengan realitas sosio-

¹⁷Melihat fenomena ini, otoritas dan kekuasaan Kiai ditentukan oleh struktur jaringan, khususnya adanya garis penghubung atau koneksi diantara aktor yang ada. Aktor-aktor tersebut, menjadikan Kiai sebagai sentralitas dari struktur yang ada. Semakin luas koneksi Kiai, maka semakin kuat pengaruh Kiai. Maka menjadi penting bagi Kiai sebelum memutuskan turun pada gelanggang politik ada baiknya menguatkan dulu koneksi yang ada, baik koneksi antar Kiai, alumni dan masyarakat, maupun koneksi dengan tokoh-tokoh politik. George Ritzer, *Teori Sosiologi Modern*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hlm. 363

¹⁸<http://sumsel.tribunnews.com/2018/06/27/hasil-sementara-pilwako-banyuasin-aslon-no-urut-5-askolani-slamet-ungguldiakses> pada tanggal 10 september 2018 jam 08.00 wib

¹⁹Jumlah santriaktif yang tercatatsaatini, berjumlah 2.092 orang, data ini dapat di lihat padaprofilPondokPesantrenQodratullahLangkanBanyuasin Sumatera Selatan tahun 2017/2018

²⁰Irwan Abdullah, *Konstruksi...* hlm. 244

kultural menjadikan proses-proses pembiasaan sebagai langkah awal dari pelebagaan. Untuk itu, yang terpenting adalah kesadaran diri ketika ber-interaksi bersama dengan orang lain dijadikan kebiasaan, dan membentuk lembaga-lembaga yang merupakan milik bersama. Lembaga ini mengatur dan mengendalikan perilaku individu.²¹ Selanjutnya realitas sosial yang membedakan Kiai pesantren dengan Kiai-Kiai lain dapat ditemukan dalam berbagai basis sosial masyarakat, seperti dalam ajaran-ajaran agama, lembaga sosial, mistisisme atau mitos-mitos, praktik dan simbol-simbol sosial lainnya. Konstruksi sosial Kiai yang terbentuk sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari proses Reformasi pasca runtuhnya Orde Baru, dalam kaitan ini setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhinya diantaranya:

Pertama, institusionalisasi atau pelebagaan. Pada proses ini nilai-nilai yang dibangun merupakan kesadaran yang diaplikasikan melalui tindakan. Tindakan-tindakan yang dilakukan merupakan kesadaran yang bukan dibuat-buat, sebagaimana Kiai ketika melakukan tindakan-tindakan tertentu karena mereka memahami betul bahwa apa yang mereka lakukan melalui proses pemaknaan dan mereka memahami konsekuensi dari tindakan tersebut. Sama halnya dengan masyarakat ketika mereka melakukan sesuatu tindakan tentu memiliki tujuan yang telah mereka sadari akan manfaat yang diperoleh dari suatu tindakan.

Kedua, Kiai, pesantren dan masyarakat adalah tiga bentuk entitas yang berbeda. Kiai dengan kultur yang terbangun di dalamnya sebagai sosok atau figur panutan umat. Sementara itu, dari perspektif masyarakat Kiai dan pesantren adalah entitas yang dihadapkan dalam proses objektivasi. Para Kiai dan pesantren merupakan dunia sosial sebagai suatu realitas. Dialog *intersubjektif* yang terjadi antara masyarakat dengan realitas sosial yang berada di luar dirinya memungkinkan munculnya makna-makna baru.²² Makna-makna baru tersebut terbentuk melalui proses dialektika antara dua realitas yang berhadapan-hadapan sehingga terjadi integrasi di dalamnya.

Ketiga, pembiasaan, yaitu proses dari tindakan rasionalitas bertujuan tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, penafsiran dari sebuah tindakan tidak lagi diperlukan untuk tindakan berikutnya, karena tindakan tersebut sudah menjadi bagian dari sistem kognitif dan evaluatifnya.²³ Peta kesadaran telah menerima dan sistem evaluasi yang berasal dari sistem nilai telah menjadi bagian dari

²¹Irwan Abdullah, *Konstruksi*,...hlm. 245

²²Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme*,... hlm. 273

²³Ali Maschan Moesa, *Nasionalisme*,...hlm. 273.

seluruh mekanisme kehidupannya. Maka dari itu, ketika suatu tindakan telah menjadi pembiasaan, maka telah menjadi tindakan yang mekanis yang mesti dilakukan begitu saja.

Proses dialog *intersubjektif* antara Kiai pesantren dan masyarakat, melahirkan pemaknaan baru. Dalam hal ini Kiai pesantren dengan tradisi yang berjalan di dalamnya dengan yang bukan adalah buatan manusia yang berproses -menjadi- melalui tahapan konstruksi sosial. Dunia sosial Kiai atau dunia sosial di luar Kiai seringkali tidak disadari, bahwasanya sebagai realitas para Kiai (sebagai individu) dan masyarakat akan berusaha memenangkan proses dialog yang terjadi tersebut. Bisa saja terjadi, dialog paham ideologi yang menjunjung nilai-nilai akhlak dan moralitas dengan paham yang berkembang dalam realitas politik sebagaimana yang dipahami pada lingkungan sosialnya. Proses intersubjektifitas disini terbentuk melalui realitas objektif yang berbanding terbalik dengan realitas subjektif masyarakat, yang pada gilirannya akan melahirkan makna-makna baru dari hasil integrasi dua realitas yang ada, atau merupakan hasil penolakan dari salah satu realitas.

Kiai sebagai pemimpin pesantren dengan pemahaman ilmu-ilmu agama yang mendalam, serta identik dengan pengajaran dan penguasaan kitab-kitab klasik mengalami *intersubjektif*. Dimana masyarakat tidak lagi melihat Kiai sebagai teladan umat yang diikuti berdasarkan keilmuwan yang dikuasai, akan tetapi Kiai dipandang sebagai pejabatan struktural atau *Mudir* (direktur) pesantren. Kiai tak ubahnya sebagai pejabat formal dalam struktur pesantren yang keberadaannya hanya sebatas pimpinan yang berperan sebagai direktur lembaga pendidikan berbasis agama. Pemaknaan yang demikian, disetujui atau tidak menjadikan Kiai kehilangan peran sosialnya di masyarakat. Ketika Kiai tidak lagi menjabat sebagai pimpinan pesantren, pada saat bersamaan se-akan-akan hilang juga ke-Kiaiannya, termasuk legitimasi dan otoritas serta pengaruhnya pada lembaga pendidikan yang pernah dikembangkan.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan pada tiga pesantren yang penulis sebutkan sebelumnya, diantara tiga pesantren tersebut ada kesamaan tradisi.²⁴Kiai dapat diangkat dan diberhentikan oleh yayasan, berhubung status Kiai hanya sebagai *Mudir* yang jabatannya berada di bawah kepemimpinan struktur yayasan pada lembaga pendidikan Islam. Kiai sebagai pejabat formal pesantren, mau tidak mau harus tunduk dan patuh kepada struktur yayasan. Dengan adanya legalitas ini,

²⁴Observasi dan pengamatan lapangan pada tanggal 21 Mei 2018

persoalan selanjutnya yang akan muncul adalah ketika terjadi suksesi kepemimpinan, yayasan mengalami dilema yang cukup serius. Dilema ini terjadi manakala akan menunjuk atau mengangkat Kiai baru, belum tentu Kiai yang ditunjuk yayasan dapat diterima oleh seluruh Sumber Daya Manusia yang ada di Pesantren.

Selanjutnya, dunia pesantren di Sumatera Selatan akan mengalami krisis kepemimpinan. Krisis kepemimpinan ini menjadi kegelisahan hampir seluruh Kiai pesantren yang saat ini masih menjabat sebagai *Mudir*. Berdasarkan hasil wawancara²⁵ dengan tiga narasumber dari masing-masing pesantren yang menjadi fokus kajian penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa pesantren yang ada di Sumatera Selatan ini, belum mampu menyiapkan kader pengganti yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat pesantren. Masih banyak penolakan-penolakan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penolakan tersebut terjadi karena tiga faktor; *pertama*, Kiai belum memiliki figur pengganti yang memiliki kharisma yang dapat diterima oleh seluruh warga pesantren; *kedua*, senioritas, maksudnya para ustad atau *asatidz* yang mengabdikan dan turut serta dalam proses pengembangan pesantren dari awal berdirinya sampai masa perkembangannya merasa lebih berhak untuk mendapat jabatan tinggi pada struktur pesantren; *ketiga*, sebagian besar pesantren yang ada tidak berangkat dari kultur pesantren, termasuk di dalamnya adalah Kiai.

Maka dari itu, setidaknya ada tiga faktor penting yang dapat dilakukan Kiai, diantaranya: *pertama*, kaderisasi Kiai. Kaderisasi dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab Kiai, apabila pada saatnya nanti tidak lagi menjabat sebagai pimpinan pesantren (*Mudir*). Kaderisasi setidaknya diambil dari garis keturunan Kiai yang memiliki kemiripan dengan Kiai sebelumnya, dengan cara di didik dan digembleng sedemikian rupa hingga pada saatnya nanti mampu melanjutkan kepemimpinan yang ada; *kedua*, mendatangkan Kiai dari luar pesantren, hal ini dilakukan manakala dalam pesantren tidak ditemukan sosok pengganti yang dapat diterima oleh masyarakat pesantren; *ketiga*, struktur yayasan melalui musyawarah mufakat, mengangkat dan menunjuk Kiai yang sekiranya dapat diterima semua kalangan.

c. Internalisasi

Internalisasi sebagai kelanjutan dari semua proses yang ada, dimana realitas objektif di tarik kembali ke dalam diri individu (manusia) dan dijadikan sebagai

²⁵Wawancara dilakukan penulis pada saat dan waktu yang berbeda, diantaranya; wawancara dengan Ustadz Mustofa, M.Pd.I, dilaksanakan pada tanggal 08 agustus 2018, wawancara dengan Ustadz Heru, S.Pd.I pada tanggal 26 september 2018 dan wawancara dengan Ustadz Rahmat Hidayat, Lc, M.Phil, pada tanggal 19 september 2018 serta wawancara dengan Ustadz Badruddin, S.Pd.I pada tanggal 25 september 2018.

bagian dari hidupnya²⁶. Sebagai proses identifikasi diri, individu secara terus menerus dan bersosialisasi dengan lingkungan sosial dan budayanya, sehingga menghasilkan berbagai penggolongan sosial yang berangkat dari kesadaran dan pemahaman serta identifikasi diri. Pada akhirnya Kiai dibentuk sebagai sosok pribadi dengan suatu identitas yang dikenal secara objektif maupun secara subjektif dari individu. Untuk itu, individu sebagai bagian yang membentuk kelompok masyarakat dipahami sebagai proses dialektika antara makna-makna subjektif dan data-data objektif, melalui interaksi hubungan timbal balik antara apa yang dipahami sebagai realitas luar serta apa yang dipahami sebagai kesadaran individu.

Dalam realitas sosial, individu memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok sebagai proses dari sosialisasi. Proses ini dianggap sebagai struktur dasar dari sosialisasi primer, yang berlanjut pada sosialisasi sekunder. Kecenderungan individu ini seringkali didasarkan atas rasa seidentitas, selanjutnya membentuk kesadaran kolektif. Sementara kesadaran kolektif hanya terbentuk apabila individu memiliki identitas yang sama. Jika individu sebagai kelompok sosial bertemu dan berkumpul dengan kelompok yang seidentitas, maka akan berlangsung hubungan yang intensif. Jika santri berkumpul dengan sesama santri, maka hubungan yang terbangun akan intensif, pun demikian antar sesama Kiai. Simbol-simbol yang melekat pada individu yang terbentuk melalui proses ini, akan menunjukkan identitas seseorang akan realitas sosial yang ada disekitarnya.

Bentuk dari proses ini adalah, ketika pesantren sebagai institusi dikenal sebagai wadah untuk sosialisasi dalam realitas sosial masyarakat, sebagai institusi bercorak keagamaan, maka orang akan dengan mudah mengidentifikasi berdasarkan interaksi yang terjadi di dalamnya. Mulanya orang yang mengenakan surban dan berpeci warna putih, sudah dapat dipastikan bahwa ia telah melaksanakan ibadah haji. Pun demikian, jika ada orang mengenakan sarung dan berkopyah sudah bisa dipastikan ia adalah seorang santri. Simbol-simbol perilaku yang demikian akan dengan mudah dapat mengidentifikasi seseorang ditengah-tengah interaksinya dalam realitas sosial.

Berangkat dari proses dialektika yang terbangun dari tiga faktor di atas, maka konstruksi sosial yang terbentuk merupakan kesadaran subjektif melalui dialektika karena adanya hubungan antara realitas sosial objektif. Proses dialektika yang ditemukan dalam penelitian ini berupa dialektika antara realitas sosial Kiai dengan kesadaran masyarakat

²⁶Irwan Abdullah, *Konstruksi...* hlm. 245

Sumatera Selatan disisi yang lain. Lebih lanjut, identitas Kiai sebagai elit pesantren dan sekaligus sebagai pemimpin pesantren dan masyarakat sebagai suatu struktur terjadi proses internalisasi, termasuk masyarakat yang terstruktur oleh realitas objektif. Ketika Kiai masuk pada wilayah politik praktis, disinilah eksternalisasi terjadi. Kiai dan masyarakat sama-sama berusaha membangun dunia sosialnya sebagai bentuk kehidupan berpolitik. Eksternalisasi bagi masyarakat Sumatera Selatan, berusaha membangun tatanan atau struktur politik yang stabil agar ketika Kiai yang notabene panutan umat tidak kehilangan kredibilitasnya di masyarakat. Oleh sebab itu, dengan teori konstruksi sosial yang penulis jabarkan panjang-lebar di atas, maka implikasi logis dari persinggungan Kiai pesantren dengan politik akan membawa pengaruh terhadap eksistensi Kiai di pesantren dan masyarakat secara lebih luas.

Kiai sebagai elit sekaligus sebagai pemimpin umat (agama), memiliki dominasi yang lebih dominan dibandingkan dengan elit lokal yang lain. Identitas Kiai yang identik dengan tokoh panutan umat, serta pemahaman terhadap ilmu agama yang mendalam turut serta memperkuat legitimasi tersebut, tak jarang berbagai persoalan yang menyentuh kehidupan sosial masyarakat seringkali dikonsultasikan kepada para Kiai. Baik keputusan maupun tindakan masyarakat selanjutnya seringkali diserahkan dan ditentukan oleh Kiai sebagai rujukannya. Tindakan masyarakat ini, merupakan bentuk dari konstruksi sosial yang tercipta melalui proses panjang, tentunya di masing-masing daerah memiliki karakteristik dan bentuk yang berbeda. Umumnya, simbol-simbol yang melekat pada diri Kiai merupakan kunci pokok legitimasi yang dibangun Kiai. Oleh sebab itu, sikap dan kepatuhan umat sedikit banyak dipengaruhi oleh kharisma atau ketokohan Kiai.

Pada tradisi pesantren, hubungan sosial Kiai dan masyarakat merupakan *intersubjektif* dari interaksi keagamaan dan emosi keagamaan. Hubungan ini pada gilirannya akan menjadi infrasutruktur yang membentuk tatanan kehidupan sosial masyarakat atau umat. Sementara itu, Kiai di Sumatera Selatan berada pada posisi yang dikotomis, sesuai dengan peran sosial politik yang dimainkannya. Dalam konteks ini, Kiai di Sumatera Selatan yang menjadi poin penelitian ini ketiganya memiliki peran sosial yang sama, yakni sebagai *Mudir* disatu sisi dan tokoh politik di sisi yang lain. Oleh sebab itu, Kiai di Sumatera Selatan lebih mendapat pengakuan dibidang sosial politik, pendidikan dan ekonomi dibandingkan pengakuan di bidang agama. Hanya saja, kharisma yang terbagun karena perannya dalam pengembangan dunia pendidikan dan peran sosial politiknya, tidak serta merta menjadikan Kiai di Sumatera Selatan menjadi elit yang kuat. Kalaupun Kiai memiliki pengaruh dan legitimasi, itupun

hanya sebatas pada pesantren yang dikembangkannya, serta terbatas pada masa ketika Kiai menjadi *Mudir* atau pimpinan pesantren²⁷.

Keberhasilan Kiai dalam mengembangkan lembaga pendidikan, karena Kiai di Sumatera Selatan termasuk pada kategori Kiai Moderat yang cenderung adaptif dan progresif. Keterbukaannya dengan inovasi-inovasi baru, serta mampu mengikuti perkembangan zaman dengan segala perubahan yang ada dapat dilihat dari pengembangan program-program pesantren serta pengembangan lembaga pendidikan dari jenjang pendidikan yang ada. Adanya karakteristik yang sama dari ketiga pesantren seperti pengembangan program tahfidz al-Qur'an dan pengembangan jenjang pendidikan yang ada di pesantren, Kiai di Sumatera Selatan memanggil alumni-alumni yang memiliki basis keilmuan dari latar belakang magister dan alumni dengan latar belakang tahfidz al-Qur'an untuk kembali ke pesantren. Contoh lainnya, Kiai mengkaderisasi santri dengan cara mengirimnya ke pesantren lain dengan basis ke-ilmuan al-Qur'an serta mengirimnya untuk studi lanjut pada perguruan tinggi baik yang ada di wilayah Sumatera Selatan maupun ke Jawa, namun tak jarang santri juga di kirim ke Timur Tengah, seperti Mesir, Yaman, Sudan dan lainnya.

Kiai di Sumatera Selatan mampu membangun model pendidikan pesantren, sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Identitas pesantren sebagai pusat pendidikan mendorong Kiai untuk adaptif dan progresif dalam mengembangkan model pendidikan pesantren. Pesantren harus mampu menghadapi tuntutan perkembangan zaman, dimana masyarakat semakin realistis dalam memilih lembaga pendidikan untuk masa depan anak-anak mereka. Disinilah peran Kiai di Sumatera Selatan mampu menjawab tantangan itu. Kiai di tiga pesantren yang menjadi basis studi dalam penelitian ini, mampu mengembangkan lembaga pendidikan modern dengan tidak meninggalkan tradisi pesantren tradisionalnya. Mereka mampu memadukan sistem pendidikan tradisional dan modern, untuk menjawab tantangan perubahan zaman. Akibatnya pesantren dengan ciri khas tradisionalnya, dan cenderung konservatif sedikit banyak mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, pesantren Nurul Muhajirin Tanjung Lago Banyuasin mulai awal berdirinya sampai sekarang belum nampak perkembangan yang signifikan²⁸, termasuk jumlah santri serta sarana prasarana pesantren yang apa adanya turut menambah keterpurukan tersebut. Untuk itu, Kiai

²⁷Hasil observasi menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan Kiai di tiga pesantren (Pesantren Ittifaqiah, Pesantren Raudhatul Ulum, dan Pesantren Qodratullah) lebih pada kepemimpinan kolektif kolegial. Kiai dibantu wakil mudir dan divisi-divisi lain dalam melaksanakan kepemimpinannya. Namun, meskipun segala keputusan atau kebijakan pesantren melalui forum musyawarah dengan dasar kesepakatan bersama, akan tetapi dalam penetapan struktur kepengurusan pesantren masih menjadi otoritas Kiai. Observasi pada bulan mei-agustus 2018

²⁸Wawancara dengan Ustadz Badruddin, S.Pd.I pada tanggal 25 september 2018

dituntut mampu menyelenggarakan model pendidikan yang relevan dengan kehidupan masyarakat modern, apabila tidak ingin ditinggalkan oleh masyarakat.

Persinggungan Kiai dengan politik turut membawa implikasi terhadap eksistensi Kiai dan lembaga yang dipimpinnya. Politik yang seringkali dianggap masyarakat sebagai sesuatu yang “kotor” dan syarat dengan kepetingan turut memudahkan kharisma Kiai. Disadari atau tidak keterlibatan Kiai dalam politik membawa eksese negatif, khususnya bagi kehidupan sosial Kiai selanjutnya. Namun, tidak semua masyarakat memberi label negatif terkait dengan keterlibatannya dalam politik, ada sebagian masyarakat yang justru menilainya positif, mereka berasumsi bahwa Kiai yang terlibat politik memiliki peran yang lebih luas, tidak sebatas peran dakwah tetapi peran-peran lain. Kiai akan lebih luas perannya apabila turut serta pada politik praktis, terutama terkait kebijakan pemerintah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Melalui politik inilah, Kiai diharapkan turut serta mengontrol kebijakan-kebijakan pemerintah, meminimalisir penyelewengan kekuasaan serta diharapkan mampu menegakkan *amar ma'ruf* demi kepentingan umat yang lebih luas.

Keterlibatan Kiai dalam politik, tentunya berangkat dari ideologi agama dan rasa keprihatinan terhadap kondisi yang ada, walaupun sebagian berangkat dari motif-motif lain sebagaimana yang penulis uraikan pada bab sebelumnya. Tentunya dalam hal ini, setiap Kiai memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda. Maraknya kasus korupsi dan kebijakan pemerintah yang seringkali tidak pro rakyat turut serta dalam proses kenapa Kiai harus terlibat dalam politik. Rasa keprihatinan yang mendalam ini menjadi dasar K.H. Buya Husni Thamrin untuk turut serta terlibat dalam politik, disamping dorongan yang begitu kuat dari beberapa Kiai, ulama' dan tokoh-tokoh pendiri Banyuasin untuk mencalonkannya sebagai Bupati Banyuasin selanjutnya²⁹. Sebagaimana hasil wawancara dengan KH. Husni Thamrin Madani, menyatakan bahwa;

“...pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terhadap Yan Anton Ferdian pada tanggal 5 september 2016 yang juga merupakan anak dari Bupati sebelumnya Amiruddin Inoed, menimbulkan rasa keprihatinan dalam diri saya. Saya prihatin karena saya termasuk salah satu yang memelopori pemekaran Kabupaten Banyuasin yang sebelumnya masih Musi Banyuasin. Dari awal berdirinya Banyuasin, belum pernah ada pemimpin Banyuasin yang berasal dari Banyuasin atau orang asli Banyuasin. Bagaimana mungkin Banyuasin akan maju kalau yang memimpin Banyuasin bukan berangkat dari putra daerah Banyuasin, malah yang terjadi seperti saat ini, Bupati nya di tangkap KPK...”³⁰

²⁹Wawancara dengan Ustadz Mustofa Kamal, M.Pd.I pada tanggal 8 agustus 2018

³⁰Wawancara dengan K.H.M. Husni Thamrin Madani pada tanggal 21 mei 2018

Dinamika yang terjadi pada Kabupaten Banyuasin, sedikit banyak menjadi awal keterlibatan Buya Husni Thamrin maju pada pentas pilkada pemilihan Bupati Banyuasin periode 2018/2022. Walaupun pada perkembangannya Buya lebih memilih jalur Independen sebagai basis perjuangannya dalam kontestasi pilkada di Banyuasin. Jalur Independen dipilihnya bukan tanpa alasan, “mahar politik” yang cukup besar, menurut Buya turut serta dalam menumbuhkan budaya korupsi yang terjadi. Anggapan ‘balik modal’ menjadi rahasia umum ketika calon-calon tersebut nantinya terpilih dan memulai proses kepemimpinannya. Hanya saja bagaimana nantinya ketika Buya menjadi Bupati Banyuasin, apakah mampu mewujudkan visi misinya Banyuasin Bersih dan Anti Korupsi.³¹ Maka dalam hal ini penulis belum mampu memberikan jawaban, karena pada saat wawancara, tahapan proses pilkada baru dimulai.

Lebih lanjut tidak ada larangan khusus untuk Kiai berpolitik, hanya saja orientasi Kiai pada politik harus demi kepentingan umat bukan untuk mengejar kekuasaan belaka. Dalam konteks ini, Kiai dan pesantren menjadi pertarungan. Kiai yang mampu memainkan peran sosial politiknya dengan tetap menjaga norma-norma dan agama sebagai acuannya, tidak perlu merasa khawatir akan ditinggalkan umat-nya. Akan tetapi sebaliknya, Kiai yang tak ubahnya seperti politisi pada umumnya, sedikit banyak mulai ditinggalkan oleh umat-nya. Implikasinya pesantren maupun lembaga pendidikan yang dikembangkannya turut akan merasakan dampaknya. Kiai yang mulanya menjadi tokoh panutan yang semua fatwanya diikuti umat, lambat laun akan mulai ditinggalkan. Pada gilirannya Kiai tak ubahnya hanya sebagai politisi yang tidak mampu mewarnai politik dengan nilai-nilai idealisme ajaran Agama, justru diwarnai politik dengan segala konsekwensinya.

Berangkat dari fenomena di atas, ada yang menarik terkait persinggungan Kiai dengan politik yang terjadi di Sumatera Selatan. Ketiga Kiai yang menjadi basis studi, ketiganya menerapkan manajemen kepemimpinan kolektif, yang tidak akan menggagu proses dan sistem pendidikan yang dikembangkan. Perpaduan sistem tradisional dan modern dalam pengembangan lembaga pendidikan, menjadikan tiga pesantren ini menjadi pesantren yang unggul dan kompetitif dalam menghadapi modernisme, globalisasi maupun industrialisasi. Inilah yang oleh Parsons mereka mampu membangun sistem yang terus beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan berbagai kondisi, dan situasi sesuai dengan kebutuhannya³². Implikasinya, lembaga pendidikan yang dikembangkan Kiai di Sumatera Selatan menjadi lembaga pendidikan modern yang di minati oleh masyarakat secara luas. Hal ini, dapat dilihat

³¹Wawancara dengan K.H.M. Husni Thamrin Madani pada tanggal 21 Mei 2018

³²George Ritzer, *Teori Sosiologi...* hlm. 117

dari jumlah santri pada tiga lembaga pendidikan ini yang jumlahnya sangat signifikan dan terus mengalami peningkatan, serta sarana prasarana yang cukup memadai sebagai lembaga pendidikan Islam modern.

C. Kesimpulan

Dalam penelitian ini terungkap bahwa, peran Kiai sebagai pemimpin pesantren tidak seperti yang kita duga selama ini. Peran dan otoritas Kiai di Sumatera Selatan sebatas pada lembaga pendidikan yang dikembangkan Kiai, itupun ketika Kiai masih menduduki sebagai pemimpin pesantren atau *Mudir*. Selebihnya otoritas Kiai di masyarakat sedikit banyak telah memudar. Memudarnya otoritas Kiai ini, disebabkan oleh beberapa faktor; *pertama*: keberadaan Kiai bukan berangkat dari struktur sosial masyarakat, tetapi merupakan bentukan dari yayasan pendidikan Islam; *kedua*, untuk menjadi Kiai, tidak membutuhkan persyaratan tertentu termasuk kedalaman ilmu agama Islam; *ketiga*, Kiai dapat diangkat dan diberhentikan oleh yayasan.

Kendati demikian, persentuhan Kiai dengan politik tidak mempengaruhi eksistensi lembaga pendidikan yang dikembangkannya. Berdasarkan temuan, lembaga pendidikan Kiai yang menjadi basis studi penelitian ini menerapkan kepemimpinan kolektif kolegial, yang mana model ini tidak begitu membawa pengaruh signifikan ketika Kiai harus disibukkan dengan berbagai persoalan termasuk soal politik. Hal ini nampak dari perkembangan lembaga pendidikan Kiai yang masih menjadi alternatif pilihan masyarakat untuk menitipkan anak-anaknya. Pesantren-pesantren ini, umumnya memiliki sarana-prasarana yang memadai, serta memiliki jumlah santri yang terbilang cukup besar dan mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2010. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Dhofier, Zamakhsyari. 2011. *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Menegenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Maschan Moesa, Ali. 2007. *Nasionalisme Kiai: Konstruksi Sosial Berbasis Agama*. Yogyakarta: LKIS
- Rahim, Husni. 1998. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu
- Ritzer, George. 2015. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenamedia Group
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologis Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Steenbrink, Karel A. 1984. *Beberapa Aspek Tentang Islam di Indonesia Abad ke 19*. Jakarta: Bulan Bintang
- Tholhah Hasan, Muhammad. 2005. *Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia..* Jakarta: Lantabora Press.
- Geertz, Clifford. *The Javanese Kijai: The Changing Role of Cultural Broker*”, dalam *Comparative Studies in Society and History*, vol. 2
- Data Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017
- Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, *Provinsi Sumatera Selatan dalam Angka 2018*
- <http://sumsel.tribunnews.com/2018/06/27/hasil-sementara-pilwako-banyuasin-aslon-no-urut-5-askolani-slamet-unggul> diakses pada tanggal 10 september 2018 jam 08.00 wib